

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Laporan keuangan didefinisikan sebagai informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan yang juga dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan suatu perusahaan (Hidayat, 2018). Laporan keuangan merupakan salah satu kunci penting yang digunakan oleh para pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan ekonomi. Oleh karena itu, suatu laporan keuangan tidak boleh bias, dapat dipercaya (andal), serta mampu menggambarkan kondisi perusahaan yang sebenarnya. Kesalahan dalam pengambilan keputusan akibat informasi dalam laporan keuangan yang keliru tentu akan mendatangkan kerugian besar yang nantinya akan menggoyang kestabilan perekonomian negara.

Terdapat banyak skandal terkait kecurangan pada laporan keuangan akibat tuntutan serta target keuangan yang harus dicapai perusahaan. Beberapa skandal sempat menghebohkan sektor-sektor perusahaan yang ada di Indonesia, salah satunya adalah sektor keuangan. Industri perbankan maupun industri keuangan nonbank pada sektor keuangan dipercaya masyarakat untuk menyimpan serta menyalurkan dananya. Oleh karena itu, baik industri perbankan maupun industri keuangan nonbank tentu sudah memiliki pengawasan yang ketat dari pihak yang berwenang, seperti Otoritas Jasa Keuangan. Selain itu, pemeriksaan ketat atas laporan keuangan juga dilakukan dengan melibatkan auditor eksternal dari kantor akuntan publik yang terdaftar. Namun pada realitanya, tidak semua sektor keuangan

di Indonesia mampu mempertahankan kinerja baiknya dan tidak juga luput dari kasus-kasus kecurangan pelaporan keuangan.

*Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE), yaitu organisasi *antifraud* terbesar di dunia, melakukan survei terkait *fraud* yang terjadi beserta dampak kerugian yang ditimbulkan. Hasil survei tersebut dikemukakan dalam laporannya yang dikenal dengan *Report to the Nations on Occupational Fraud and Abuse* yang diterbitkan setiap dua tahun sekali. Dalam laporannya, ACFE (2016) menunjukkan bahwa perusahaan kehilangan 5% dari pendapatan yang diperoleh setiap tahunnya akibat *fraud*. Penyalahgunaan aset sejauh ini merupakan bentuk *fraud* yang paling umum, terjadi di lebih dari 83% kasus, tetapi menyebabkan kerugian median terkecil sebesar \$125.000. Sedangkan *fraud* pada laporan keuangan terjadi kurang dari 10% kasus tetapi menyebabkan kerugian rata-rata hingga \$975.000 (ACFE, 2016). Penelitian atas *fraud* di Indonesia tercermin pada laporan Survei *Fraud* Indonesia (SFI) yang dilakukan oleh ACFE Indonesia Chapter. Hasilnya mengemukakan *fraud* yang terjadi pada tahun 2018 menyebabkan kerugian sebesar 5% dari pendapatan kotor suatu organisasi (ACFE, 2020).

*Fraud* menjadi masalah yang terus ada hingga saat ini. Tidak ada perusahaan/lembaga yang benar-benar terbebas dari kemungkinan terjadinya *fraud* (ACFE, 2020). Berdasarkan *Statement of Auditing Standards* (SAS) No.99 mengenai *Consideration of Fraud in a Financial Statement Audit* yang diterbitkan oleh *American Institute Certified Public Accountant* (AICPA), kecurangan itu sendiri merupakan tindakan yang disengaja yang mengakibatkan kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan yang menjadi subjek audit (AICPA,

2002). Adanya kecurangan dalam pelaporan keuangan membawa dampak buruk yang sangat besar. Informasi salah yang disajikan tentu akan menyesatkan berbagai pihak yang menggunakan laporan keuangan dalam membuat keputusan.

Isu terkait kecurangan dalam pelaporan keuangan yang terjadi selama tahun 2017-2019 di Indonesia, di antaranya PT Sunprima Nusantara Pembiayaan yang melibatkan KAP Satrio, Bing, Eny & Rekan (*Partner* Deloitte Indonesia), PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dan PT Asabri (Persero) yang melibatkan beberapa Kantor Akuntan Publik besar dan juga PricewaterhouseCoopers (PwC). Laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan-perusahaan tersebut sangat berguna bagi para pemangku kepentingan, khususnya bagi investor dan juga nasabah yang mempercayakan dananya untuk disimpan di lembaga keuangan tersebut. Akan tetapi, laporan keuangan yang seharusnya andal dan mampu memberikan informasi yang sebenar-benarnya justru mengecewakan berbagai pihak.

Kesulitan keuangan karena harus mendapatkan modal kerja yang besar untuk menutupi kredit atas kerja sama dengan Columbia saat itu menjadi awal mula munculnya kasus atas PT Sunprima Nusantara Pembiayaan atau yang dikenal dengan SNP *Finance*. SNP *Finance* merupakan bagian usaha Columbia, jaringan ritel yang menawarkan pembelian barang rumah tangga secara kredit atau cicilan. SNP *Finance* menyokong pembelian barang yang dilakukan oleh Columbia dengan sumber pendanaan dari perbankan atau surat utang. Atas kerja sama tersebut, SNP *Finance* akhirnya mengemban kewajiban untuk melunasi utang pada bank. Namun, menurunnya bisnis ritel Columbia akhirnya membuat kredit perbankan SNP *Finance* mengalami masalah, hingga akhirnya gagal bayar. Masalah tersebut

membuat SNP *Finance* memalsukan data dan memanipulasi laporan keuangannya dengan membuat piutang fiktif melalui penjualan fiktif yang gagal dideteksi oleh auditor eksternalnya, Deloitte (Tim CNN Indonesia, 2018). Peristiwa tersebut mengindikasikan bahwa kecurangan dalam pelaporan keuangan dapat terjadi ketika target keuangan suatu entitas sudah terlalu berat, ditambah lagi dengan pengawasan yang kurang efektif, baik dari pihak internal maupun eksternal perusahaan.

Di samping itu, PT Asuransi Jiwasraya (Persero) juga menjadi sorotan berikutnya di sektor keuangan. Kasus yang melibatkan berbagai pihak, termasuk di dalamnya terdapat salah satu pejabat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan juga beberapa manajer investasi, diduga melakukan *fraud* atas pengelolaan investasi. Laba bersih Jiwasraya yang dilaporkan dalam laporan keuangan yang telah diaudit oleh PwC menunjukkan laba bersih tahun 2015 adalah 1,06 triliun rupiah, sedangkan pada tahun 2016 adalah sebesar 1,7 triliun rupiah. Akan tetapi, Jiwasraya kemudian mengumumkan tak mampu membayar klaim polis JS *Saving Plan* yang jatuh tempo sebesar 802 miliar rupiah pada tahun 2018. Dugaan *fraud* atas pengelolaan investasi pada laporan keuangan tersebut ternyata gagal dideteksi oleh PwC (Kampai, 2020).

Begitu juga dengan PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Persero) atau Asabri yang dilaporkan mencatat laba pada tahun 2015 sebesar 347 miliar rupiah kemudian disusul laba pada tahun 2016 sebesar 116 miliar rupiah dengan opini audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Sedangkan, laba pada tahun 2017 tercatat melonjak menjadi 943 miliar rupiah, naik tujuh kali lipat dari tahun sebelumnya, dengan opini audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari PwC

(Valenta, 2020). KAP besar tersebut gagal mendeteksi bahwa terdapat manipulasi harga melalui pembelian saham dalam portofolio Asabri dengan saham-saham milik beberapa pihak tertentu yang dilakukan semata-mata agar mampu menonjolkan kinerja portofolio yang baik. Transaksi semu tersebut tentu menyebabkan kerugian yang tidak sedikit dan kinerja PT Asabri menjadi dikuasai oleh pihak-pihak tertentu yang tidak sebagaimanamestinya (Merdeka, 2021).

Beberapa kasus tersebut dapat terjadi karena adanya berbagai faktor yang memengaruhi yang telah dipaparkan dalam berbagai teori. Teori terkait *fraud* pertama kali dikemukakan oleh Cressey pada 1950 yang dikenal dengan *fraud triangle theory*. Di dalam teori tersebut, dijabarkan elemen-elemen yang dapat mendeteksi terjadinya kecurangan laporan keuangan yaitu *pressure*, *opportunity*, dan *rationalization*. Kemudian teori tersebut disempurnakan oleh Jack Bologne pada tahun 1993 menjadi *gone theory*. Teori ini memaparkan akar penyebab kecurangan yang terdiri dari empat faktor, yaitu *greed*, *opportunity*, *need*, dan *expose*. *Gone theory* selanjutnya dikembangkan menjadi *fraud diamond theory* oleh Wolfe & Hermanson pada tahun 2004 dengan menambahkan *capability* sebagai elemen keempat. Pada tahun 2011, teori tersebut dikembangkan lagi oleh Crowe dengan menambahkan elemen *arrogance* di dalamnya. Teori tersebut kini dikenal dengan *Crowe's fraud pentagon model*. Terjadinya kecurangan dalam pelaporan keuangan juga tidak terlepas dari akibat adanya konflik kepentingan antara investor (*principal*) yang menuntut meningkatnya kinerja baik perusahaan, sedangkan manajemen (*agent*) memiliki kepentingannya sendiri sebagaimana dipaparkan dalam *agency theory*.

Berdasarkan isu yang diangkat dalam penelitian ini, terdapat faktor-faktor utama yang menyebabkan terjadinya kecurangan dalam pelaporan keuangan. Faktor-faktor tersebut yaitu besarnya target keuangan yang harus dicapai, lemahnya pengendalian internal dan pengawasan yang tidak efektif, serta tindakan pembenaran atas kecurangan yang telah dilakukan. Target keuangan menjadi tuntutan bagi manajemen yang harus dicapai agar dapat menarik perhatian investor. Target keuangan yang dicapai biasanya ditunjukkan pada nilai *return on assets* (ROA) yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba dari aset yang digunakan. Semakin tinggi laba yang harus dicapai memperlihatkan semakin tingginya target keuangan perusahaan yang memungkinkan semakin tinggi pula potensi terjadinya kecurangan dalam laporan keuangan. Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Reskino & Anshori (2016) serta Nugraheni & Triatmoko (2017). Akan tetapi, hasil tersebut tidak didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni & Budiwitjaksono (2017) dan Aulia & Afiah (2020).

Kemudian, kecurangan juga mungkin terjadi karena tidak ada kontrol yang baik dan ketidakefektifan pengawasan (*ineffective monitoring*) di dalam suatu perusahaan. Pengawasan yang lemah memberikan peluang bagi manajemen untuk melakukan kecurangan guna memaksimalkan kepentingan pribadinya. Pernyataan tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Putri, *et al.*, (2017) serta Jamil & Yudowati (2019), tetapi bertentangan dengan penelitian Pardosi, *et al.*, (2015), Nugraheni & Triatmoko (2017), dan Wahyuni & Budiwitjaksono (2017).

Selain itu, *rationalization* (rasionalisasi) juga berkaitan erat dengan sebab terjadinya kecurangan. Sikap rasionalisasi menjadikan seseorang membenarkan perbuatan yang tidak jujur. Beberapa penelitian terdahulu mengemukakan bahwa pergantian auditor dapat menjadi salah satu cara seseorang menutupi tindakan tidak jujur karena mengurangi kemungkinan terdeteksinya kecurangan dalam pelaporan keuangan oleh auditor yang baru. *Rationalization* yang diprosikan dengan pergantian auditor menjadi salah satu faktor yang dapat mengindikasikan adanya kecurangan pada laporan keuangan. Hal itu didukung oleh hasil penelitian milik Tiffani & Marfuah (2015), Yulistyawati, *et al.*, (2019), dan Aulia & Afiah (2020). Akan tetapi, hasil tersebut bertentangan dengan penelitian milik Tiffani & Marfuah (2015) serta Jamil & Yudowati (2019).

Penelitian yang belum konsisten tersebut membuat peneliti tertarik untuk melihat lebih dalam lagi bagaimana pengaruh *financial targets*, *ineffective monitoring*, dan *rationalization* terhadap kecurangan dalam pelaporan keuangan (*fraudulent financial reporting*) pada sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2017—2019.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Apakah *financial targets* berpengaruh terhadap *fraudulent financial reporting*?
2. Apakah *ineffective monitoring* berpengaruh terhadap *fraudulent financial reporting*?
3. Apakah *rationalization* berpengaruh terhadap *fraudulent financial reporting*?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini sebagaimana mengacu pada rumusan masalah yang ada adalah sebagai berikut.

1. Untuk membuktikan pengaruh *financial targets* terhadap *fraudulent financial reporting*.
2. Untuk membuktikan pengaruh *ineffective monitoring* terhadap *fraudulent financial reporting*.
3. Untuk membuktikan pengaruh *rationalization* terhadap *fraudulent financial reporting*.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Manfaat Teoretis

Penulis berharap studi keilmuan dalam bidang akuntansi dan audit, khususnya dalam hal pelaporan keuangan dapat terus ditingkatkan. Banyak perusahaan belum sepenuhnya secara konsisten mampu menyajikan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya tindak kecurangan dalam pelaporan keuangan. *Agency theory* mengungkapkan bahwa *agent* ditunjuk oleh *principal* dalam melaksanakan aktivitas operasional dan mengambil keputusan bisnis. Peran *agent* yang mendominasi kegiatan bisnis mampu meningkatkan potensi terjadinya kecurangan dalam pelaporan keuangan. Hal tersebut dapat terjadi akibat tuntutan yang harus dihadapi *agent* dalam memenuhi target yang

diharapkan oleh *principal*. Selain itu, banyak faktor lain yang perlu diketahui dan dipahami sehingga tindakan preventif dapat dilakukan sedini mungkin demi meningkatkan citra baik suatu perusahaan.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Perusahaan

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan mampu menjadi gambaran bagi perusahaan bahwa banyak faktor yang mampu menyebabkan terjadinya tindak kecurangan pada akhirnya berdampak negatif bagi perusahaan itu sendiri. Perusahaan diharapkan dapat mempertimbangkan lebih matang lagi pada saat hendak melakukan tindak kecurangan dalam pelaporan keuangannya. Walaupun banyak tuntutan yang menekan agar kinerja perusahaan menjadi meningkat, diharapkan perusahaan mampu mencari solusi yang lebih kreatif, inovatif, dan cara yang baik dalam menyelesaikannya.

### b. Bagi Auditor dan Pihak Eksternal Lainnya

Dengan mengetahui faktor pemicu tindak kecurangan dalam pelaporan keuangan, auditor semakin dilatih untuk menerapkan skeptisisme profesional ketika mempertimbangkan kemungkinan kesalahan penyajian material yang diakibatkan oleh kecurangan. Selain itu, pihak eksternal lain yang juga menjadi pengguna laporan keuangan diharapkan untuk lebih jeli dan teliti dalam mencermati informasi yang terdapat pada laporan keuangan. Informasi tersebut sebaiknya dianalisis terlebih dahulu sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara tepat serta pertanda terjadinya kecurangan dapat dideteksi dan dicegah sedini mungkin.